

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari bekerja atau mengusahakan sesuatu untuk dapat dikerjakan. Baik itu bekerja yang di lakukan seorang diri maupun pekerjaan yang di lakukan secara berkelompok atau tim kerja. Setiap pekerjaan yang di lakukan juga selalu terikat dengan risiko kerja yang akan dialami. Keselamatan kerja adalah suatu upaya pengendalian bahaya supaya tidak menyebabkan kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian dan memberikan jaminan karyawan dan sistem kerja aman (Sujoso, 2012).

Perlindungan diri dari risiko kerja merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap pekerja untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan finansial mereka. Izzati et al., (2024) menjelaskan kesejahteraan finansial sebagai keadaan dimana seseorang merasa aman dan stabil secara finansial, memiliki cukup sumber daya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta merasa tidak khawatir akan masa depan finansialnya. Dalam konteks ini, kesejahteraan finansial tidak hanya terkait dengan penghasilan yang di terima, tetapi juga kemampuan individu untuk mengelola keuangan secara bijaksana, termasuk pengaturan pengeluaran, tabungan, investasi, serta perencanaan pensiun. Pekerja yang merasa aman dalam hal finansial lebih mungkin untuk fokus, pada

pekerjaan dan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk berkontribusi positif bagi kemajuan perusahaan atau organisasi.

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Supadmo et al., (2022) menyatakan bahwa perlindungan kepada ketenagakerjaan di selenggarakan BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berperan aktif sebagai manifestasi daripada pemberian hak setiap tenaga kerja. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan mengikutsertakan karyawan dalam program asuransi ketenagakerjaan, seperti BPJS Ketenagakerjaan. Partisipasi dalam program ini sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul selama bekerja, terutama dalam menghadapi kecelakaan kerja.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perlindungan sosial nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Salah satu penyelenggaranya adalah BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), yang bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia melalui program-program seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari risiko sosial ekonomi yang timbul dari hubungan kerja, baik di sektor formal maupun informal.

Tabel 1.1 Jumlah Angkatan Kerja & Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Kesenjangan (Peserta)	Kesenjangan (%)
2018	127,070,000	50,569,655	76,500,345	60.20%
2019	135,859,695	55,168,782	80,690,913	59.39%
2020	138,221,938	50,696,599	87,525,339	63.32%
2021	140,152,575	50,919,505	89,233,070	63.67%
2022	143,722,644	55,379,720	88,342,924	61.47%
2023	146,621,786	59,684,672	86,937,114	59.29%

Sumber: Badan Pusat Statistik dan BPJS Ketenagakerjaan (2023), (data diolah)

Berdasarkan data BPS dan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang mencapai 60% dan berfluktuasi setiap tahunnya. Ketimpangan ini menyebabkan adanya ketidakpastian perlindungan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja sektor informal dan rentan, serta berpotensi mengurangi tingkat produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara keseluruhan. Upaya untuk memperkecil kesenjangan ini tidak hanya bergantung pada aspek regulasi dan kewajiban perusahaan, tetapi juga perlu diiringi dengan pendekatan pemberdayaan individu, seperti peningkatan literasi keuangan, sosialisasi yang efektif, dan aksesibilitas layanan jaminan sosial.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dari berbagai risiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem perlindungan sosial nasional, keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan sangat bergantung pada kualitas kepesertaan, yaitu tingkat partisipasi aktif dan kepatuhan peserta dalam memanfaatkan program secara optimal. Kualitas kepesertaan ini tidak hanya mencakup jumlah peserta yang terdaftar, tetapi juga sejauh mana peserta memahami manfaat, hak, dan kewajiban mereka serta konsistensi dalam pembayaran iuran.

Data lain dari BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 juga menunjukkan bahwa jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan adalah 41.560.938. Dari jumlah tersebut sekitar 60,13% atau 25.004.383 peserta berasal dari peserta penerima upah atau dari sektor formal. Namun, dalam praktiknya, kualitas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun jumlah peserta terus meningkat, masih terdapat gap antara jumlah kepesertaan dengan kualitas partisipasi BPJS. Menurut Laporan ILO (*International Labour Organization*) dalam *World Social Protection Report 2024-26*, meskipun cakupan administratif perlindungan sosial di berbagai negara telah meningkat, masih terdapat tantangan besar dalam hal kualitas partisipasi. ILO menegaskan bahwa cakupan formal tidak menjamin efektivitas perlindungan jika peserta tidak memahami manfaat program,

tidak menggunakan layanan secara aktif, dan tidak merasakan manfaat riil dari program yang diikuti.

Sihombing & Ritonga (2024) menemukan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan produktivitas kerja karena adanya rasa aman atau perlindungan finansial Ketika terjadi risiko kerja. Penelitian ini juga menyatakan bahwa ketika Masyarakat sadar akan pentingnya jaminan sosial ini, maka BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan keuangan bagi pekerja, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2023) menegaskan bahwa jaminan perlindungan keselamatan kerja menciptakan lingkungan kerja yang aman, memungkinkan pekerja untuk fokus tanpa kekhawatiran terhadap risiko kecelakaan, serta membantu pengusaha mengurangi potensi kecelakaan kerja. Kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kerja juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, Supadmo et al., (2022) menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk pemenuhan hak atas jaminan sosial bagi tenaga kerja. Partisipasi aktif dalam program ini menjadi langkah strategis dalam melindungi pekerja dari risiko kerja dan memperkuat sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Literasi keuangan merupakan faktor penting yang memengaruhi kemampuan individu dalam memahami, menilai, dan mengambil keputusan terkait aspek-aspek keuangan termasuk dalam konteks perlindungan sosial ketenagakerjaan. Menurut OECD (2018), literasi keuangan mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan untuk membuat keputusan keuangan yang baik dan efektif. Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan, literasi keuangan mencerminkan sejauh mana karyawan memahami manfaat dari program seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP), serta bagaimana mereka mengelola risiko keuangan jangka panjang melalui partisipasi aktif.

Aliah & Krisnawati (2019) menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan pengambilan keputusan keuangan demi tercapainya kesejahteraan finansial dengan menggunakan pengetahuan keuangan yang terdapat di dalam diri individu. Dengan adanya literasi keuangan, individu maupun keluarga dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sumber daya keuangan yang akurat dalam perencanaan keuangan.

Sosialisasi memegang berperan sebagai sarana komunikasi strategis antara institusi penyelenggara (BPJS TK dan perusahaan) dengan peserta program. Sosialisasi yang baik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang manfaat dan prosedur layanan BPJS. Sihombing & Ritonga (2024) menemukan bahwa

perluasan sosialisasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya bagi pekerja merupakan kunci untuk meningkatkan jangkauan dan pemahaman tentang pentingnya keikutsertaan dalam program ini. Peningkatan intensitas sosialisasi dapat memperbesar dampak positif program BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif.

Kemudahan akses mencakup ketersediaan informasi dan layanan yang memudahkan karyawan untuk berpartisipasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Akses yang baik dapat meningkatkan partisipasi karyawan dalam program. Akses yang dimaksud tidak hanya terbatas pada lokasi fisik kantor BPJS, tetapi juga mencakup kemudahan dalam menggunakan aplikasi digital, kejelasan prosedur klaim, serta ketersediaan informasi yang relevan dan mudah dipahami. Sulistiyo (2023) mengemukakan bahwa kemudahan akses terhadap aplikasi JKN sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan tingkat literasi digital pengguna. Semakin tinggi pemahaman digital peserta, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mengakses layanan jaminan sosial secara mandiri dan aktif. Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam meningkatkan adopsi dan aksesibilitas layanan digital BPJS.

ILO (2021) dalam *World Social Protection Report 2020–2022*, yang menegaskan bahwa transformasi digital memegang peranan penting dalam

mencapai perlindungan sosial. Artinya, penyederhanaan prosedur serta penyediaan layanan digital yang mudah diakses merupakan kunci dalam memastikan partisipasi aktif dari penerima manfaat. Dengan demikian, kemudahan akses bukan hanya memfasilitasi penggunaan layanan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan dan efektivitas program jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kemudahan akses merupakan variabel penting dalam mendorong partisipasi aktif dalam program jaminan sosial, termasuk BPJS Ketenagakerjaan.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan mikro memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan serta menjangkau lapisan masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh bank umum. Selain memberikan akses keuangan, BPR juga memiliki kewajiban hukum dan moral dalam memastikan perlindungan sosial kepada seluruh karyawannya melalui kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban ini penting untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja sekaligus meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan operasional BPR sebagai institusi keuangan.

PT Bank Perekonomian Rakyat *Tanaoba Lais Manekat* (BPR TLM) merupakan salah satu Bank Perekonomian Rakyat terbesar di Nusa Tenggara Timur yang mulai beroperasi sejak tahun 2008 yang beralamat di Jl Ahmad Yani No. 43, Oeba, Kupang - Nusa Tenggara Timur. BPR TLM melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional mulai dari penghimpunan dana dari masyarakat melalui produk tabungan, deposito dan saham seri B, kemudian menyalurkan kembali

kepada masyarakat melalui pemberian kredit berupa produk kredit konsumtif, modal kerja dan kredit investasi. BPR TLM Kantor Pusat menjalankan operasionalnya dengan melibatkan 1 komisariss utama dan 3 orang direksi serta dibantu oleh 98 karyawan yang terbagi dalam lima divisi yaitu, Divisi Operasional, *Marketing Lending*, *Marketing Funding*, Penunjuang Kredit serta divisi Sumber Daya Manusia dan Umum.

Berdasarkan hasil wawancara awal, diketahui bahwa seluruh karyawan BPR TLM telah terdaftar sebagai peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif, yang dilaksanakan setelah karyawan memasuki masa kerja tiga bulan sebagai karyawan magang. Namun, hasil wawancara awal juga ditemukan bahwa pemahaman karyawan terhadap program tersebut masih sangat rendah. Meskipun sebagian besar karyawan memiliki latar belakang pendidikan sarjana, mereka tidak memahami dengan baik manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan, tidak mengetahui prosedur klaim, serta jarang mengakses layanan yang tersedia, termasuk melalui aplikasi Jamsostek Online (JMO). Sosialisasi yang dilakukan hanya satu kali dalam beberapa tahun terakhir, dan dalam praktiknya tidak melibatkan seluruh karyawan karena sebagian besar karyawan masih bekerja saat sosialisasi berlangsung, sehingga sosialisasi tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, karena kurangnya partisipasi karyawan tersebut, maka sosialisasi dilanjutkan oleh pihak PT BPR *Tanaoba Lais Manekat*

dalam hal ini dilimpahkan pada divisi Sumber Daya Manusia dan Umum. Karyawan diminta menggunakan Aplikasi *Jamsostek Mobile* (JMO) namun belum ditindaklanjuti secara serius.

Temuan awal diatas menunjukkan bahwa kepesertaan yang bersifat administratif belum disertai dengan keterlibatan aktif peserta yang ditandai dengan pemahaman, pemanfaatan layanan, serta persepsi atas manfaat program. Ketidaktahuan ini berpotensi menyebabkan rendahnya pemanfaatan manfaat jaminan sosial dan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi kualitas kepesertaan, yaitu sejauh mana peserta memahami, merasakan manfaat, dan secara aktif menggunakan hak-haknya dalam sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi intervensi berbasis literasi keuangan, penguatan sosialisasi, serta peningkatan kemudahan akses layanan BPJS Ketenagakerjaan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Fenomena yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan adanya tantangan dalam peningkatan kualitas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor formal. Di sisi lain, kajian empiris yang secara khusus meneliti pengaruh literasi keuangan, sosialisasi, dan kemudahan akses terhadap kualitas kepesertaan masih terbatas, terutama pada perusahaan formal seperti BPR TLM yang telah memenuhi ketentuan administratif sesuai regulasi. Urgensi ini diperkuat oleh pentingnya

kualitas kepesertaan sebagai elemen krusial dalam menjamin efektivitas perlindungan sosial serta keberlanjutan program jaminan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui **Pengaruh Literasi Keuangan, Sosialisasi, Dan Kemudahan Akses Terhadap Kualitas Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan Karyawati PT Bank Perekonomian Rakyat Tanaoba Lais Manekat Kantor Pusat Operasional Kupang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan Karyawati PT Bank Perekonomian Rakyat *Tanaoba Lais Manekat* Kantor Pusat Operasional Kupang?
2. Apakah sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan Karyawati PT Bank Perekonomian Rakyat *Tanaoba Lais Manekat* Kantor Pusat Operasional Kupang?
3. Apakah kemudahan akses berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan Karyawati PT Bank

Perekonomian Rakyat *Tanaoba Lais Manekat* Kantor Pusat Operasional Kupang?

4. Apakah literasi keuangan, sosialisasi dan kemudahan akses berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan Karyawati PT Bank Perekonomian Rakyat *Tanaoba Lais Manekat* Kantor Pusat Operasional Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji apakah Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan Karyawati PT Bank Perekonomian Rakyat *Tanaoba Lais Manekat* Kantor Pusat Operasional Kupang.
2. Untuk menguji apakah Sosialisasi berpengaruh terhadap Kualitas Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan Karyawati PT Bank Perekonomian Rakyat *Tanaoba Lais Manekat* Kantor Pusat Operasional Kupang.
3. Untuk menguji apakah Kemudahan Akses berpengaruh terhadap Kualitas Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan Karyawati PT Bank Perekonomian Rakyat *Tanaoba Lais Manekat* Kantor Pusat Operasional Kupang.

4. Untuk menguji apakah Literasi Keuangan, Sosialisasi dan Kemudahan Akses berpengaruh terhadap Kualitas Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Karyawan Karyawati PT Bank Perekonomian Rakyat *Tanaoba Lais Manekat* Kantor Pusat Operasional Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis, aplikatif, dan kebijakan khususnya bagi akademisi dan lembaga yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan literatur bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang keuangan serta dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembacanya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penulis mendapatkan ilmu dan wawasan mengenai pentingnya pengetahuan perilaku keuangan yang perlu diketahui oleh penulis melalui penelitian ini. Selain itu, penulis juga lebih mengetahui pengaruh literasi keuangan, sosialisasi dan kemudahan akses terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

- b. Bagi PT Bank Perekonomian Rakyat *Tanaoba Lais Manekat*, hasil penelitian dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengembangan perusahaan, khususnya terkait Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan.